

DARI STIGMA KE MEDIASI BUDAYA: KONFLIK SOSIAL *SOUND HOREG* DALAM WACANA MEDIA DIGITAL

Muhammad Diak Udin¹, Muhamad Rudi Wijaya²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹muhammad.udin@uin-suka.ac.id, ²muhamad.wijaya@uin-suka.ac.id

Abstrak

Perkembangan media digital telah mengubah cara praktik budaya lokal diproduksi, disirkulasikan, dan dimaknai dalam ruang publik. Artikel ini mengkaji fenomena *sound horeg* sebagai praktik budaya populer berbasis komunitas yang mengalami eskalasi konflik sosial akibat proses pelabelan, *moral panic*, dan sekuritisasi budaya dalam wacana media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *sound horeg* dikonstruksi sebagai persoalan sosial melalui mekanisme labeling dan *moral panic*, serta bagaimana media digital memediasi konflik dan stigma melalui negosiasi makna budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain netnografi dan analisis wacana kritis terhadap konten media sosial dan pemberitaan daring pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, media digital berperan ambivalen, di satu sisi memperluas visibilitas, pembentukan identitas kolektif, dan peluang ekonomi komunitas *sound horeg*, namun di sisi lain mengamplifikasi stigma, polarisasi wacana, dan legitimasi kontrol institusional melalui regulasi dan fatwa. *Kedua*, viralitas platform mendorong dekontekstualisasi praktik budaya dan memperkuat representasi problematik yang menempatkan *sound horeg* sebagai ancaman ketertiban dan moral publik. Konflik *sound horeg* merefleksikan perebutan otoritas makna antara budaya populer, kekuasaan simbolik, dan kebijakan publik dalam masyarakat yang semakin termediasi secara digital.

Kata kunci: *sound horeg*, media digital, labeling, moral panic, mediasi budaya

Abstract

The development of digital media has changed the way local cultural practices are produced, circulated, and interpreted in the public sphere. This article examines the phenomenon of *sound horeg* as a community-based popular cultural practice that has experienced escalating social conflict due to the processes of labelling, moral panic, and cultural securitisation in digital media discourse. This study aims to analyse how *sound horeg* is constructed as a social issue through the mechanisms of labelling and moral panic, and how digital media mediates conflict and stigma through the negotiation of cultural meaning. The study uses an interpretive qualitative approach with a netnographic design and critical discourse analysis of social media content and online news reports in 2025. The results of the study show that: *First*, digital media plays an ambivalent role. On the one hand, it expands visibility, collective identity formation, and economic opportunities for the *sound horeg* community. On the other hand, it amplifies stigma, polarises discourse, and legitimises institutional control through regulations and fatwas. *Second*, the virality of platforms encourages the decontextualisation of cultural practices and reinforces problematic representations that position *sound horeg* as a threat to public order and morality. The *sound horeg* conflict reflects a struggle for authority over meaning between popular culture, symbolic power, and public policy in an increasingly digitally mediated society.

Keywords: *Sound Horeg*, digital media, labelling, moral panic, cultural mediation

A. PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah secara signifikan mengubah cara praktik budaya diproduksi, didistribusikan, dan dimaknai dalam ruang publik. Platform media sosial memungkinkan budaya populer yang lahir dari komunitas lokal untuk memperoleh visibilitas luas dan melintasi batas geografis serta sosial, sekaligus menjadikan audiens sebagai partisipan aktif dalam produksi makna budaya. Transformasi ini menandai pergeseran dari budaya populer sebagai konsumsi pasif menuju praktik partisipatoris yang sarat negosiasi makna (Jenkins, 2006; Burgess & Green, 2018).

Ekspansi budaya lokal ke ruang publik digital tidak selalu berlangsung tanpa friksi. Praktik budaya yang sebelumnya diterima dalam konteks komunitas tertentu dapat memicu konflik sosial ketika berhadapan dengan nilai dominan, norma ketertiban, dan sensitivitas publik yang lebih luas. Media digital mempertemukan aktor dengan latar sosial dan kerangka nilai yang beragam, sehingga perbedaan tafsir terhadap ekspresi budaya semakin mudah muncul dan dipertajam dalam ruang publik daring (Couldry, 2012; Dahlgren, 2013).

Media digital tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai arena kontestasi wacana tempat makna budaya diproduksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan. Representasi melalui pemberitaan, unggahan video, dan komentar pengguna berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu praktik budaya. Dalam kondisi ini, budaya lokal rentan mengalami simplifikasi, stereotipisasi, dan pelabelan negatif akibat logika viralitas dan moralitas publik digital yang dominan (Hall, 1997; Pink et al., 2016).

Dalam perspektif sosiologis, teori labeling dan *moral panic* menjelaskan bagaimana praktik yang diasosiasikan dengan kelompok subordinat sering dikonstruksi sebagai gangguan sosial atau ancaman moral oleh aktor dominan, termasuk media dan institusi formal. Stigma yang terbentuk melalui proses diskursif ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang nyata, seperti marginalisasi, tekanan regulatif, dan pembatasan ruang ekspresi budaya (Becker, 1963; Cohen, 2002).

Dalam konteks Indonesia, *sound horeg* muncul sebagai praktik budaya populer berbasis komunitas yang memadukan teknologi audio, kreativitas visual, dan ekspresi identitas lokal. Namun, dalam wacana publik digital, praktik ini kerap direpresentasikan secara problematis melalui label seperti bising, rusuh, dan tidak beretika. Representasi tersebut memicu konflik sosial antara komunitas pelaku yang memaknai *sound horeg* sebagai ekspresi budaya dan ekonomi, dengan kelompok masyarakat atau otoritas yang menekankan aspek ketertiban dan keselamatan publik (Hall, 1996; Bennett, 2004).

Media digital mempercepat eskalasi konflik *sound horeg* dari isu lokal menjadi perdebatan yang lebih luas melalui mekanisme viralitas dan sirkulasi wacana. Narasi kritik dan pembelaan beredar secara simultan, menciptakan polarisasi antara stigma negatif dan klaim kebanggaan budaya. Kondisi ini menunjukkan sifat ambivalen media digital yang, di satu sisi, memperkuat stigma, tetapi di sisi lain menyediakan ruang artikulasi identitas dan resistensi simbolik bagi komunitas budaya subordinat (Burgess & Green, 2018; Couldry & Hepp, 2017).

Sejauh ini, respons terhadap fenomena *sound horeg* lebih banyak didominasi oleh pendekatan regulatif dan moralistik yang berorientasi pada pelarangan atau pembatasan, sehingga berisiko memperdalam stigma dan konflik sosial. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada dampak negatif kebisingan atau ketertiban publik, sementara kajian yang menempatkan media digital sebagai ruang potensial **mediasi budaya** masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis dua persoalan: *Pertama: Bagaimana praktik sound horeg dikonstruksi sebagai persoalan sosial melalui mekanisme labeling dan moral panic dalam wacana media digital? Kedua: Bagaimana media digital memediasi konflik dan stigma terhadap sound horeg melalui negosiasi makna budaya?*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif interpretatif** untuk memahami konflik sosial, stigma, dan upaya mediasi budaya dalam praktik *sound horeg* sebagaimana direpresentasikan dan diperdebatkan dalam wacana media digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna sosial, relasi kuasa, dan proses diskursif yang tidak dapat direduksi ke dalam pengukuran kuantitatif semata, khususnya dalam konteks budaya populer dan konflik simbolik di ruang publik digital (McQuail, 2010; Hjarvard, 2013).

Desain penelitian mengombinasikan **netnografi** dan **analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA)**. Netnografi digunakan untuk menelusuri dan mendokumentasikan praktik, interaksi, serta representasi sound horeg di platform digital sebagai bentuk kehidupan sosial yang termediasi teknologi. Metode ini relevan karena memungkinkan pengamatan sistematis terhadap dinamika komunitas daring, pola komunikasi, dan konstruksi identitas kultural dalam konteks digital yang cair dan berlapis (Kozinets, 2015; Hine, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi daring terhadap konten publik di platform media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, serta portal berita daring. Data mencakup video, caption, komentar, pemberitaan, dan opini yang membahas sound horeg dalam rentang waktu tertentu ketika isu ini mengalami intensifikasi perdebatan publik. Pemilihan data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat viralitas, keterlibatan pengguna, serta relevansinya dengan isu stigma, konflik sosial, dan regulasi budaya (Kozinets, 2020).

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengelompokan tematik untuk mengidentifikasi pola narasi dominan dan tandingan, seperti pelabelan negatif, klaim gangguan sosial, pembelaan identitas budaya, dan wacana mediasi. Proses ini bersifat refleksif, di mana peneliti secara berkelanjutan mengevaluasi posisi analitisnya dalam membaca data dan relasi makna yang muncul (Braun & Clarke, 2019).

Tahap selanjutnya menggunakan **analisis wacana kritis** untuk menelaah bagaimana bahasa, visual, dan narasi digunakan untuk membangun stigma, moral panic, serta legitimasi regulatif terhadap sound horeg. CDA memungkinkan pembacaan mendalam atas relasi antara wacana media, struktur kekuasaan, dan praktik sosial, sehingga konflik tidak dipahami semata sebagai perbedaan opini, melainkan sebagai perebutan otoritas makna dalam ruang publik digital (Fairclough, 1995, 2010).

Kerangka analisis stigma merujuk pada konsep stigma sebagai proses sosial yang melibatkan pelabelan, stereotipisasi, dan pemisahan simbolik terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks ini, stigma terhadap sound horeg dipahami tidak hanya sebagai representasi negatif, tetapi juga sebagai mekanisme yang berpotensi menghasilkan eksklusi sosial dan tekanan kebijakan (Link & Phelan, 2001). Perspektif ini membantu menjembatani analisis diskursif dengan implikasi sosial yang lebih luas.

Secara etis, penelitian ini hanya menggunakan data yang bersifat publik dan tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Identitas akun individu dianonimkan untuk menjaga privasi, dan analisis difokuskan pada pola wacana kolektif, bukan pada individu tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip etika penelitian kualitatif di ruang digital yang menekankan kehati-hatian dalam representasi dan interpretasi data daring (Hine, 2015; Kozinets, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konflik Sosial dan Stigma Sound Horeg*

Fenomena *sound horeg* memicu resistensi nyata dari masyarakat arus utama dengan berbagai label negatif. Resistensi tersebut termanifestasi dalam bentuk pelabelan *bising*, *rusuh*, dan *tidak beretika*, yang beredar luas dalam wacana media digital dan diskursus publik. Dalam kerangka teori labeling, pelabelan yang terjadi tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengonstruksi *sound horeg* sebagai deviasi dari norma dominan. Label-label tersebut bekerja untuk menyederhanakan praktik budaya yang kompleks menjadi masalah ketertiban dan moral, sehingga membatasi ruang legitimasi sosial bagi komunitas pelaku (Becker, 1963; Cohen, 2002). Temuan ini menguatkan argumen bahwa kelompok subordinat lebih rentan mengalami stigmatisasi ketika praktik mereka tidak sejalan dengan selera estetika dan norma kelas dominan.

Proses pelabelan tersebut berkelindan dengan dinamika *moral panic*, di mana *sound horeg* direpresentasikan sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial, kesehatan publik, dan nilai moral. Analisis terhadap data yang diperoleh pada berita dan opini daring menunjukkan pola naratif yang relatif konsisten: penekanan pada gangguan kebisingan, risiko fisik, serta potensi kerusakan sosial. Dalam kerangka Cohen, narasi semacam ini mencerminkan eskalasi simbolik, ketika isu yang awalnya bersifat lokal dan kultural direpresentasikan secara berlebihan sebagai masalah sosial yang membutuhkan intervensi segera (Cohen, 2002). Media digital mempercepat proses narasi melalui logika viralitas, yang mengedepankan konten problematik dan berbasis konflik, sehingga memperkuat persepsi ancaman di ruang publik yang lebih luas (Fulcrum, 2025; Konde.co, 2025).

Masuknya institusi formal ke dalam konflik *sound horeg* menandai tahap lanjut dari proses moral panic dan labeling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2025 sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur menerbitkan pedoman dan regulasi bersama terkait penggunaan pengeras suara, yang secara eksplisit membatasi praktik *sound horeg*. Selain itu, lembaga keagamaan seperti MUI juga mengeluarkan fatwa yang mengevaluasi *sound horeg* dari sudut pandang normatif dan moral. Dalam perspektif teori moral panic, keterlibatan aktor-aktor otoritatif ini menunjukkan pergeseran dari kepanikan simbolik menuju respons institusional, di mana praktik budaya tidak lagi sekadar diperdebatkan, tetapi mulai diatur dan dikendalikan secara formal (Cohen, 2002; Detik, 2025; The Jakarta Post, 2025; MUI Jawa Timur, 2025).

Pergeseran tersebut mengindikasikan proses sekuritisasi budaya, di mana *sound horeg* diposisikan sebagai isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan publik. Dalam konteks ini, ruang ekspresi budaya mengalami kompresi karena pertimbangan teknokratis dan moral. Regulasi dan fatwa berfungsi ganda, di satu sisi memberikan kerangka legal dan normatif yang jelas, namun di sisi lain memperkuat legitimasi pelabelan negatif yang telah beredar di media. Temuan ini menegaskan bahwa kekuasaan simbolik tidak hanya bekerja melalui media, tetapi juga melalui institusi yang memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan dan menormalisasi definisi tertentu tentang ketertiban sosial (Radar Surabaya Bisnis, 2025; Couldry, 2012).

Konflik antar pihak semakin terlihat jelas dalam wacana publik digital. Temuan penelitian mengungkap adanya polarisasi diskursif antara komunitas pelaku dan pendukung *sound horeg*, yang menekankan kreativitas, ekonomi mikro, dan kebanggaan lokal, dengan kelompok warga atau otoritas publik yang menekankan dampak negatif dan gangguan sosial. Kasus-kasus yang bersifat lokal, seperti keluhan warga atau kerusakan akibat *rig sound*, sering menjadi titik pemicu eskalasi konflik dan pemberitaan. Dalam perspektif labeling, insiden-insiden tersebut berfungsi sebagai bukti yang memperkuat stigma dan membenarkan kontrol sosial, sementara bagi komunitas pelaku, justru memicu pembelaan identitas dan solidaritas internal (Becker, 1963; Fulcrum, 2025; Magdalene, 2025; BeritaJatim, 2025).

Peran media digital dalam dinamika wacana *sound horeg* bersifat ambivalen. Platform seperti TikTok, YouTube, dan Facebook mempercepat visibilitas *sound horeg*, memungkinkan komunitas menyebarkan simbol, gaya, dan narasi kebanggaan kultural. Pada saat yang sama, platform yang sama juga menjadi sarana utama bagi penggiringan opini negatif, kampanye anti-horeg, dan penyebaran insiden-insiden di lapangan. Sejalan dengan kajian tentang budaya partisipatoris, media digital menciptakan ruang representasi yang kompetitif, di mana berbagai aktor berupaya mendominasi makna melalui visual, komentar, dan framing naratif (Burgess & Green, 2018; Pink et al., 2016). Akibatnya, konflik yang semula bersifat lokal dapat dengan cepat meningkat menjadi isu regional atau nasional.

Dalam kerangka representasi dan identitas, konflik seputar *sound horeg* mencerminkan perebutan otoritas makna, siapa yang berhak mendefinisikan apakah *sound horeg* merupakan ekspresi budaya yang sah atau gangguan publik yang harus dibatasi. Representasi negatif yang diproduksi oleh aktor arus utama dan diperkuat oleh media

berfungsi sebagai bentuk marginalisasi simbolik, yang menempatkan komunitas *sound boreg* di posisi defensif. Sebaliknya, komunitas *sound boreg* berupaya mereartikulasi praktiknya sebagai identitas kolektif yang positif, sebagai wujud kreativitas teknis, kebanggaan lokal, dan strategi penghidupan (Hall, 1996; Hall, 1997). Temuan ini menegaskan bahwa identitas bersifat diskursif dan selalu dinegosiasikan dalam konteks relasi kuasa yang tidak setara.

Interaksi antara stigma dan pembelaan identitas tersebut menunjukkan bahwa *sound boreg berfungsi ganda*, di satu sisi sebagai medium pembentukan identitas kolektif dan di sisi lain sebagai titik konflik sosial yang menguji batas toleransi publik. Dalam masyarakat yang semakin termediasi secara digital, konflik kultural tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang simbolik yang dibentuk oleh algoritma, framing media, dan partisipasi pengguna. Dengan demikian, *sound boreg* dapat dipahami sebagai kasus empiris yang merefleksikan dinamika lebih luas antara budaya populer, kontrol sosial, dan kekuasaan simbolik di era digital (Hall, 1997; Couldry, 2012).

2. Mediasi Budaya *Sound Boreg*

Proses viralitas memainkan peran determinan dalam mengangkat *sound boreg* dari praktik kultural lokal menjadi fenomena budaya populer lintas wilayah. Media digital, khususnya TikTok dan YouTube Shorts, bertindak sebagai infrastruktur sirkulasi yang mempercepat difusi simbol, gaya visual-audio, serta estetika teknis *sound boreg*. Sejalan dengan perspektif mediatization, viralitas tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh logika platform dan algoritma rekomendasi yang memprioritaskan konten sensasional, repetitif, dan mudah dikonsumsi. Akibatnya, *sound boreg* mengalami dekontekstualisasi dari fungsi sosial-lokalnya dan direartikulasi sebagai komoditas visual-audio yang dapat direplikasi secara luas (Burgess & Green, 2018; Pink et al., 2016; Couldry, 2012).

Dari sudut pandang mediasi budaya, tagar, challenge, dan remix audio berfungsi sebagai unit simbolik yang menjembatani praktik lokal dengan audiens yang lebih luas. Praktik ini mengubah *sound boreg* menjadi objek budaya yang terbuka untuk reinterpretasi, dan bahkan didistorsi maknanya. Proses tersebut menegaskan argumen bahwa media digital bukan hanya menyalurkan realitas sosial, tetapi secara aktif membingkai bagaimana praktik budaya dipahami secara kolektif. Platform digital berperan sebagai aktor perantara yang menentukan visibilitas, legitimasi, dan hirarki makna dalam ruang publik digital (Couldry, 2012; Fulcrum, 2025).

Fitur-fitur yang teknis yang disediakan oleh platform digital, seperti format video pendek, fitur duet atau stitch, serta kolom komentar, memungkinkan terjadinya interaksi lintas generasi dan lintas posisi sosial. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ruang komentar dan respons kreatif menjadi arena diskursif tempat nilai-nilai yang bertentangan dipertemukan, generasi muda dan komunitas *sound boreg* menegaskan bahwa *sound boreg* sebagai ekspresi kreativitas, solidaritas, dan kebanggaan lokal, sedangkan kelompok warga atau tokoh moral menekankan aspek kebisingan, etika publik, dan ketertiban sosial. Pola ini memperlihatkan bagaimana konflik kultural dimediasi secara ringkas dan emosional oleh logika platform, yang cenderung mendorong polarisasi dari pada dialog mendalam (Burgess & Green, 2018; Pink et al., 2016; Magdalene, 2025).

Dalam kerangka teori labeling, interaksi digital tersebut memperlihatkan proses pelabelan simbolik yang berlangsung secara intensif. Label seperti *bising*, *rusuh*, atau *mengganggu* beredar luas dalam komentar dan pemberitaan daring, membentuk identitas sosial negatif yang dilekatkan pada komunitas *sound boreg*. Pelabelan ini tidak hanya mendefinisikan praktik, tetapi juga memposisikan pelakunya sebagai *masalah sosial* yang layak dikontrol. Konflik tidak semata terjadi pada level praktik fisik, melainkan pada level simbolik dan representasional, di mana legitimasi budaya dipertaruhkan (Becker, 1963; Cohen, 2002).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa *sound boreg* menjadi medan kontestasi antara klaim ekspresi kultural dan tuntutan regulasi sosial. Analisis wacana media dan

pernyataan institusi memperlihatkan pergeseran narasi dari hiburan rakyat menuju wacana sekuritisasi yang menekankan keselamatan publik, kesehatan, dan moralitas. Dalam kerangka moral panic, eskalasi ini mencerminkan proses di mana praktik budaya tertentu dikonstruksi sebagai ancaman sosial melalui amplifikasi media dan intervensi aktor otoritatif. Media digital mempercepat proses tersebut dengan menyediakan bukti visual, narasi insiden, dan opini moral yang mudah disirkulasikan (Cohen, 2002; Detik, 2025; The Jakarta Post, 2025).

Keterlibatan pemerintah daerah dan MUI, melalui platform digital menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya bekerja pada level budaya populer, tetapi juga pada relasi kuasa. Pernyataan kebijakan, pedoman teknis, dan fatwa yang disebarluaskan melalui media daring memperkuat legitimasi tindakan pengaturan dan pembatasan terhadap *sound horeg*. Dalam perspektif Couldry, situasi ini menegaskan bahwa media memediasi distribusi otoritas simbolik, aktor regulatif memperoleh kapasitas untuk mendefinisikan norma publik secara cepat dan luas, sering kali dengan mengandalkan narasi dominan yang telah terbentuk sebelumnya (Couldry, 2012; MUI Jawa Timur, 2025).

Namun demikian, peran media digital bersifat ambivalen. Di satu sisi, viralitas membuka peluang pengakuan sosial dan ekonomi bagi komunitas *sound horeg*, termasuk meningkatnya permintaan jasa teknis, kompetisi sound, dan perdagangan aksesoris audio. Di sisi lain, visibilitas yang sama mempermudah mobilisasi kampanye anti-horeg berbasis video insiden dan testimoni gangguan. Temuan ini menguatkan argumen bahwa mediasi digital merupakan arena kontestatif, di mana hasil akhir, apakah konflik mereda atau mengeras, bergantung pada framing dominan, intervensi opinion leader, serta respons institusional yang muncul (Burgess & Green, 2018; Fulcrum, 2025; Detik, 2025).

Dari perspektif representasi dan identitas, temuan penelitian menunjukkan bahwa *sound horeg* memfasilitasi pembentukan identitas kolektif yang bersifat diskursif dan hibrid. Visual-audio viral berfungsi sebagai perangkat representasi yang menegaskan nilai-nilai komunitas muda, seperti kompetensi teknis, kreativitas remix, dan solidaritas. Sebaliknya, wacana kritis merepresentasikan *sound horeg* sebagai objek moral dan publik yang perlu dikendalikan. Kontestasi wacana *sound horeg* menegaskan pandangan Stuart Hall bahwa identitas bukanlah esensi tetap, melainkan hasil negosiasi makna yang berlangsung dalam medan representasi, khususnya melalui media (Hall, 1997; Hall, 1996).

Konflik seputar *sound horeg* tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan kebisingan atau ketertiban, tetapi sebagai perebutan otoritas makna di ruang publik digital. Label negatif dan wacana *moral panic* berfungsi sebagai mekanisme marginalisasi simbolik, sementara wacana tandingan dari komunitas pelaku berupaya mereartikulasi *sound horeg* sebagai budaya yang sah dan bernilai. Mediasi digital menjadi arena di mana kedua posisi tersebut diuji, diperdebatkan, dan dinegosiasikan secara terus-menerus (Cohen, 2002; Hall, 1997; Couldry, 2012). Temuan-temuan penelitian menegaskan bahwa sound horeg merupakan fenomena *mediatized culture*, di mana praktik lokal, identitas kolektif, dan kebijakan publik saling berkelindan melalui logika media digital.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, fenomena *sound horeg* berkembang menjadi konflik kultural yang kompleks akibat proses pelabelan, *moral panic*, dan sekuritisasi budaya yang dimediasi secara intens oleh media digital. Praktik budaya ini direduksi menjadi isu ketertiban, moral, dan keselamatan melalui label-label negatif yang diproduksi dan disirkulasikan dalam wacana publik, sehingga membatasi legitimasi sosial komunitas pelaku. Media digital berperan ambivalen: memperluas visibilitas dan pembelaan identitas komunitas, sekaligus mengamplifikasi stigma dan eskalasi konflik. Keterlibatan institusi formal—melalui regulasi dan fatwa—menandai pergeseran dari kepanikan simbolik menuju kontrol institusional, yang memperkuat kekuasaan simbolik arus utama. Polarisasi diskursif antara pembelaan kreativitas dan ekonomi lokal versus narasi gangguan sosial menunjukkan bahwa

konflik *sound horeg* pada dasarnya merupakan perebutan otoritas makna dalam relasi kuasa yang timpang. Dengan demikian, *sound horeg* merefleksikan dinamika lebih luas antara budaya populer, kontrol sosial, dan negosiasi identitas di era masyarakat terdigitalisasi.

Selanjutnya, riset ini juga menunjukkan bahwa, Viralitas media digital mentransformasikan *sound horeg* dari praktik kultural lokal menjadi fenomena budaya populer lintas wilayah melalui logika platform yang mendorong dekontekstualisasi dan komodifikasi. Mediasi digital mempertemukan klaim kreativitas dan identitas lokal dengan narasi gangguan dan moralitas, yang cenderung dimediasi secara ringkas dan emosional sehingga memperkuat polarisasi wacana. Dalam kerangka labeling dan *moral panic*, pelabelan negatif yang teramplifikasi media berkontribusi pada proses sekritisasi budaya melalui keterlibatan aktor institusional. Meski demikian, mediasi digital juga membuka ruang pembelaan identitas dan peluang ekonomi bagi komunitas pelaku, menegaskan bahwa konflik *sound horeg* merupakan perebutan otoritas makna di ruang publik digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Bennett, A. (2004). Consolidating the music scenes perspective. *Poetics*, 32(3–4), 223–234. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2004.05.004>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Burgess, J., & Green, J. (2018). *YouTube: Online video and participatory culture* (2nd ed.). Polity. https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=youtube-online-video-and-participatory-culture--9781509520530
- Cohen, S. (2002). *Folk devils and moral panics* (3rd ed.). Routledge. <https://www.routledge.com/Folk-Devils-and-Moral-Panics/Cohen/p/book/9780415254302>
- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity. https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=media-society-world-social-theory-and-digital-media-practice--9780745647038
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Dahlgren, P. (2013). *The political web: Media, participation and alternative democracy*. Palgrave Macmillan.
- DetikJatim. (2025, August 9). Lengkap! Ini isi aturan soal Sound Horeg di Jawa Timur. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-8053129/lengkap-ini-isi-aturan-soal-sound-horeg-di-jawa-timur>
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Fulcrum. (2025, August 4). Indonesia's sound horeg economy: Freedom of expression versus public health and order. <https://fulcrum.sg/indonesias-sound-horeg-economy-freedom-of-expression-versus-public-health-and-order/>
- Hall, S. (1996). Introduction: Who needs “identity”? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of cultural identity* (pp. 1–17). Sage.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/representation/book228501>
- Hine, C. (2015). *Ethnography for the internet: Embedded, embodied and everyday*. Bloomsbury Academic.
- Hjarvard, S. (2013). *The mediatization of culture and society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203155363>

- Indonesia at Melbourne. (2025, July 10). Sound horeg: When public noise isn't the people's voice. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/sound-horeg-when-public-noise-isnt-the-peoples-voice/>
- International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHES). (2025). Damayanti, G. *Sound Horeg Parade: A Cultural Legal Perspective*. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/article/download/1498/1160/14486>
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Konde.co. (2025, September 5). Gelegar Sound Horeg: Hiburan rakyat mestinya tak abaikan kelompok rentan. <https://www.konde.co/2025/09/gelegar-sound-horeg-hiburan-rakyat-mestinya-tak-abaikan-kelompok-rentan/>
- Kozinets, R. V. (2020). Netnography update: New directions in social media research. *Journal of Marketing Management*, 36(1–2), 1–8. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2019.1700682>
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology*, 27, 363–385. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363>
- Magdalene. (2025, August). Halo Aku 'Sound Horeg', Teror Kamu sampai Masa Depan. <https://magdalene.co/story/sound-horeg-polusi-udara-akustik/>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. (2025, July 15). MUI Jatim resmi tetapkan fatwa Sound Horeg. <https://mui.or.id/baca/berita/mui-jatim-resmi-tetapkan-fatwa-sound-horeg-berikut-isi-fatwanya>
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2016). *Digital ethnography: Principles and practice*. SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/digital-ethnography/book243616>
- Silverstone, R. (2007). *Media and morality: On the rise of the mediapolis*. Polity Press.
- The Jakarta Post. (2025, August 11). East Java moves to regulate controversial horeg sound systems amid backlash. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/08/12/east-java-moves-to-regulate-controversial-horeg-sound-systems-amid-backlash.html>
- Thompson, J. B. (1995). *The media and modernity: A social theory of the media*. Polity Press.